

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Partai politik merupakan elemen penting yang bisa memfasilitasi berlangsungnya sistem demokrasi dalam sebuah negara, bagi negara yang menganut sistem multipartai seperti negara Indonesia, sangat jarang ada partai politik yang mampu meraih jumlah suara yang dominan dalam pemilihan umum, baik pemilihan umum kepala daerah seperti Bupati, Walikota, Gubernur maupun pemilihan Presiden. Hal inilah yang menyebabkan partai politik harus saling bekerjasama untuk memenuhi *persentase* jumlah suara sehingga bisa mendaftarkan calon kandidat yang akan diusungnya.

Kecenderungan umum dalam pemilihan Presiden adalah terbentuknya koalisi partai politik. Landasan koalisi yang berupa faktor teknis karena kurang memenuhi syarat untuk dapat mengajukan kandidat calon Presiden sendiri, membuat partai politik melakukan koalisi, koalisi pun dibangun berdasarkan landasan untuk memenangkan kandidat yang diusung. Oleh karena itu, melalui strategi koalisi dengan banyak partai diharapkan sumber dukungan terhadap calon akan lebih besar. Dalam khazanah politik, koalisi merupakan gabungan dua partai atau lebih dengan tujuan untuk membentuk secara bersama satu pemerintahan.

Koalisi merupakan suatu keniscayaan yang tak bisa dihindari dalam proses bangsa yang menganut sistem multipartai. Berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang *Presidential threshold*, suatu partai politik harus mencapai 25% hasil suara sah dalam pemilihan calon legislatif dan harus menembus 20% hasil suara partai, jika tidak memenuhi persyaratan tersebut maka suatu partai harus berkoalisi dengan partai lain agar bisa mencalonkan kandidatnya menjadi calon Presiden. Seperti kita ketahui pada pemilu legislatif yang dilaksanakan pada

Ali Irawan, 2016

KOALISI POLITIK PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) DENGAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P) PADA PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2014

tanggal 9 April 2014 membuktikan bahwa dari data yang diperoleh dari KPU Republik Indonesia tidak ada satu pun partai politik yang mencapai *presentase* jumlah suara yang sudah ditetapkan.

Berikut penulis tampilkan perolehan suara pada pemilu tahun 2014 berdasarkan hitungan final oleh KPU dalam situsnya <http://www.kpu.go.id> (9 Mei, 2014):

Tabel 1.1
Hasil Pemilu 9 April 2014

| NO | NAMA PARTAI | PROSENTASE PEROLEHAN SUARA SAH |
|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Partai Nasdem | 6.72% |
| 2 | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 9.04% |
| 3 | Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | 6.79% |
| 4 | PDI Perjuangan (PDIP) | 18.95% |
| 5 | Partai Golkar | 14.75% |
| 6 | Partai Gerindra | 11.81% |
| 7 | Partai Demokrat | 10.19% |
| 8 | Partai Amanat Nasional (PAN) | 7.59% |
| 9 | Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 6.53% |
| 10 | Partai Hanura | 5.26% |
| 11 | Partai Damai Aceh | 0% |
| 12 | Partai Nasional Aceh | 0% |
| 13 | Partai Aceh | 0% |
| 14 | Partai Bulan Bintang | 1.46% |
| 15 | PKP Indonesia (PKPI) | 0.91% |
| TOTAL DATA MASUK: | | 100% |

Sumber :<http://www.kpu.go.id> di olah peneliti tahun 2015

Komisi Pemilihan Umum akhirnya menetapkan hasil perolehan suara pemilu legislatif 2014, dari tabel di atas bisa dilihat bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) meraih suara terbanyak dengan jumlah suara partai

Ali Irawan, 2016

KOALISI POLITIK PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) DENGAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P) PADA PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2014

mencapai 18,95 persen, sementara itu di tempat kedua dan ketiga di tempati oleh partai Golongan Karya (Golkar) dengan perolehan suara 14.75% kemudian disusul oleh partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan perolehan suara sebanyak 11.81%, kemudian ada dua partai dinyatakan tidak memenuhi ambang batas parlemen sehingga tidak mendapatkan jatah kursi di DPR, yaitu Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Dengan tidak ada satupun partai politik yang mencapai *presentase* yang sudah ditentukan maka setiap partai politik berlomba-lomba untuk melakukan koalisi dengan partai lain.

Jumlah partai politik di Indonesia masih cukup banyak, masing-masing tentu mengklaim memiliki ciri khas atau karakteristik yang berbeda, akan tetapi perbedaan itu sebenarnya tidak begitu tampak bagi orang yang mengamatinya hanya selintas, maka tidak mudah membedakan antara Golkar, Nasdem, dan Demokrat. Kesulitan yang sama juga terjadi ketika membedakan antara PPP, PKB ataupun PKS. Sejak pemilihan Presiden pada tahun 2014, semua partai politik melakukan koalisi menjadi dua kekuatan, yaitu Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Dasar koalisi itu juga tidak mudah ditangkap, seperti koalisi itu didasari oleh faktor agama, maka tidak mudah dicari pembedanya. PKB sebagai partai politik yang berbasis umat Islam ternyata berkoalisi dengan PDI-P, Nasdem, dan Hanura yang notabene berbasis nasionalis. Sementara itu, PPP, PAN, dan PKS yang semuanya diakui memiliki kaitan yang erat dengan basis masa Islam ternyata juga berkoalisi dengan Golkar dan Gerindra yang juga berideologi nasionalis. Seandainya saja koalisi itu menjadi dua dan mendasarkan pada agama, maka PKB akan berkoalisi dengan PAN, PKS, dan PPP. Sedangkan PDI-P akan berkoalisi dengan Gerindra, Demokrat, Golkar, dan Hanura. Akan tetapi kenyataan politik yang terjadi justru tidak demikian.

Ali Irawan, 2016

KOALISI POLITIK PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) DENGAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P) PADA PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2014

Ada sesuatu yang menarik dalam format koalisi partai politik sekarang ini, partai politik kontestan pemilu di Indonesia tidak mempunyai basis ideologi yang jelas. Jika diperiksa, azas semua partai politik itu nyaris tidak ada yang berbeda, semua mengaku nasionalis dan pro-rakyat. Namun, kenyataannya tindakan politik partai dalam ranah pengambilan kebijakan politik tidak mencerminkan azas partainya. Ada partai yang mengaku nasionalis religius, tetapi praktek politiknya sangat pro-modal asing dan gampang disuap (korup). Ada juga partai yang mengaku mewakili “wong cilik”, tetapi di parlemen mereka mewakili kepentingan pengusaha atau pemilik modal. Salah satu penyebab utama dari semua itu adalah sikap berpolitik yang tidak didasari ideologi yang jelas, Menurut Firmanzah (2011, hlm. 40) ideologi didefinisikan sebagai:

Arah dan petunjuk tentang identitas partai politik sekaligus menjelaskan kondisi ideal masyarakat yang ingin dibentuk. Ideologi tidak hanya sebatas retorika politik saja, tetapi juga harus terjawantahkan dalam setiap aktivitas yang dilakukan partai politiknya. Tanpa ini, masyarakat luas akan kesulitan mengidentifikasikan masing-masing partai politik.

Ideologi menjadi pijakan partai dalam menentukan agenda politik strategis dalam koalisi. Jika partai memiliki ideologi, maka agenda politik koalisinya pun jelas, ada cita-cita, program, dan target-target politik yang konkret. Ketika partai tidak memiliki ideologi, maka koalisi pun tidak memiliki agenda dan target yang jelas. Tidak hanya itu, karena ideologi menyangkut pemihakan politik, maka koalisi partai tidak berideologi tidak lebih dari koalisi pragmatis di kalangan elit partai. Karena cenderung pragmatis, maka persatuan dan perpisahan pun menjadi hal biasa dalam koalisi partai tak berideologi.

Penampilan partai yang bertumpu pada pimpinan atau pemilik partai juga terlihat sangat jelas. Di dalam iklim kepartaian semacam itu, inisiatif berkoalisi bukanlah diputuskan atas kehendak seluruh anggota partai, melainkan berdasarkan kehendak sang pimpinan partai. Apa yang diputuskan sebagai kesepakatan atau

Ali Irawan, 2016

KOALISI POLITIK PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) DENGAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P) PADA PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2014

konsensi dalam koalisi juga lebih cenderung mewakili keinginan sang pemimpin partai, dan pada akhirnya dalam iklim kepartaian yang semacam itu, koalisi antara partai tidak lebih dari koalisi antar elit pimpinan partai.

Hasrat berkuasa partai-partai kontestan pemilu di Indonesia makin menjauh dari *virtue* (keutamaan) dalam politik, yakni seni menggunakan kekuasaan untuk kepentingan umum atau kepentingan rakyat. Sebaliknya, hasrat berkuasa partai-partai di Indonesia adalah hasrat memuaskan kepentingan golongan dan pribadi. Fenomena ini mudah terlihat dalam ajang pemilu, misalnya, masing-masing partai sibuk saling-sikut dan mengaku sebagai yang paling berhak atas kekuasaan. Segala macam cara pun dipakai di antaranya kampanye hitam, hujat-menghujat, politik uang, dan lain-lain. Padahal, jika partai itu merasa berjuang untuk kepentingan bangsa, maka pemilu seharusnya mereka tempatkan sebagai ajang demokratis untuk mempertarungkan gagasan dan program-program politik untuk memperjuangkan masa depan bangsa yang lebih baik.

Dari permasalahan yang akan dibahas perlu dilakukan analisis terlebih dahulu, untuk analisis masalah partai politik PKB dalam berkoalisi dengan partai PDI-P akan menggunakan perspektif sosiologi politik dengan berbagai teori yang digunakan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana partai politik PKB dalam berkoalisi dengan PDI-P, yang akan menjadi objek dalam penelitian ini adalah koalisi partai politik PKB dengan PDIP pada Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden tahun 2014, sehingga judul penelitian ini adalah *“Koalisi Politik PKB dengan PDI-P Pada Pemilihan Presiden Tahun 2014”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas maka terdapat beberapa rumusan masalah, yaitu:

Ali Irawan, 2016

KOALISI POLITIK PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) DENGAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P) PADA PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2014

1. Bagaimana proses koalisi yang terjadi antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pada pemilihan Presiden tahun 2014?
2. Faktor apa yang mempengaruhi terbentuknya koalisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pada pemilihan Presiden tahun 2014?
3. Kendala apa yang dihadapi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pada pemilihan Presiden tahun 2014?
4. Bagaimana upaya yang dilakukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dalam mengatasi kendala yang muncul ketika melakukan koalisi pada pemilihan Presiden tahun 2014?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparan rumusan masalah di atas, maka beberapa tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui proses koalisi yang terjalin antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pada pemilihan Presiden tahun 2014.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi terbentuknya koalisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pada pemilihan Presiden tahun 2014.
3. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dalam melakukan koalisi pada pemilihan Presiden tahun 2014.
4. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dalam mengatasi

Ali Irawan, 2016

KOALISI POLITIK PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) DENGAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P) PADA PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2014

kendala yang muncul ketika melakukan koalisi pada pemilihan Presiden tahun 2014.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan bidang ilmu politik, terutama tentang koalisi partai politik pada pemilihan Presiden tahun 2014, sehingga dapat memberikan masukan keilmuan dalam pengembangan khazanah keilmuan bidang Pendidikan Kewarganegaran khususnya dalam domain politik tentang kajian kepartaian.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi mahasiswa

Mahasiswa dapat mengetahui tentang proses koalisi partai politik baik partai politik Islam ataupun nasionalis dalam pemilihan Presiden, sehingga diharapkan menjadi stimulus yang baik terhadap generasi muda seperti mahasiswa untuk memahami secara mendalam tentang situasi politik yang sedang terjadi dalam kehidupan kenegaraan Indonesia.

b. Bagi lembaga

Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk menambah keilmuan khususnya rumpun ilmu politik yang dapat digunakan oleh dosen jurusan PKn sebagai bahan ajar. Juga dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam menentukan kebijakan terhadap pengembangan keilmuan program studi.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan masyarakat sendiri dalam bidang ilmu politik, dan sangat berguna dalam

Ali Irawan, 2016

KOALISI POLITIK PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) DENGAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P) PADA PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2014

memberikan informasi bagi masyarakat tentang koalisi kepartaian dan situasi politik yang sedang terjadi dalam kehidupan kenegaraan Indonesia.

E. Sistematika Penulisan

Bab I : Merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

Bab II: Merupakan pengembangan dari landasan teoritis yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji.

Bab III: Merupakan bab yang mengkaji tentang metodologi penelitian yang yang digunakan oleh peneliti.

Bab IV: Merupakan bab yang mengkaji tentang hasil penelitian dan menganalisis data yang telah ditemukan.

Bab V : Merupakan bab terakhir yang merupakan kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.

Ali Irawan, 2016

KOALISI POLITIK PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) DENGAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P) PADA PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2014